Bab -1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya terencana dan sistematis untuk menghasilkan suatu yang bermanfaat atau untuk meningkatkan kinerja instansi dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang tersedia.

Pembangunan yang dilakukan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur merupakan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelamatan arsip yang bernilai guna dan pengembangan perpustakaan.

Upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut membutuhkan perencanaan strategis Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015 – 2019, yang memuat Visi, Misi, tujuan, kebijakan program dan kegiatan. Sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Penyusunan Rencan Kerja SKPD dengan mengacu pada Rencana Strategis SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perpustakaan dan Kearsipan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015 - 2019, dimana rencana programnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2007, yaitu :

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan)
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
7. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Rencana Kerja (Renja) Badan Perpustakaan dan Kearsipan tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam pengusulan pendanaan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan perpustakaan dan kearsipan

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya suatu rencana pembangunan perpustakaan dan kearsipan jangka pendek yang lebih terarah.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perpustakaan dan Kearsipan adalah :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun Nomor 108 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur;
10. Keputusan Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Nomor 050/18/210.1/2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2019.

D. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa permasalahan yang apabila tidak segera ditangani, akan berdampak pada kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan. Permasalahan tersebut adalah :

1. Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan

   Sumber Daya manusia utama yang ada di Badan Perpustakaan dan Kearsipan adalah Pustakawan dan Arsiparis. Keduanya merupakan tulang punggung bagi pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kedua sumber daya tersebut ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal

ini perlu dilakukan guna menyediakan sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan yang tangguh serta siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan globalisasi.

Pustakawan sebagai motor penggerak dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat, perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Sehingga pada gilirannya mampu membangun jaringan masyarakat gemar membaca di seluruh provinsi Jawa Timur.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan melalui SDM perpustakaan yang dimiliki harus mampu mendorong terjadinya proses transformasi yang menjadikan perpustakaan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. Perpustakaan harus mampu menjadi sarana pembangun pemahaman masyarakat, tentang pentingnya esensi keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap kepentingan publik. Perpustakaan juga harus mampu mendorong meningkatnya tingkat kecerdasan masyarakat, sehingga menjadi bekal bagi pembangunan bangsa seutuhnya.

Pembinaan terhadap SDM perpustakaan mutlak diperlukan. Bukan hanya pada pejabat fungsional Pustakawan, tetapi juga pada pembuat kebijakan dan petugas teknis pengelola perpustakaan yang jumlahnya jauh lebih banyak, dan terdapat di hampir pelosok daerah. Karena itu berbagai bentuk pelatihan tentang perpustakaan sudah dipersiapkan untuk mendidik dan meningkatkan baik kualitas dan kuantitas tenaga terdidik di bidang perpustakaan.

Arsiparis sebagai Jabatan Fungsional didalam Pemerintahan mempunyai pekerjaan yang sangat penting, kompleks penuh dengan tuntutan keprofesionalannya. Arsiparis haruslah mempunyai ketrampilan tinggi berbasis pada pendidikan, pengalaman dan kaya akan teori dan praktis, mereka harus memahami manajemen aset, teknologi informasi dan komunikasi, alokasi sumber daya, dan pemasaran. Memperkerjakan arsiparis profesional adalah investasi penting dalam organisasi, keberadaannya adalah merupakan sesuatu yang fundamental bagi pemerintahan, dunia pendidikan, bahkan bagi masyarakat. Sayangnya, jumlah tenaga fungsional ini semakin berkurang dengan berbagai alasan. Hal ini perlu segera diantisipasi dengan penciptaan tenaga fungsional baru, sehingga kebutuhan lembaga terhadap tenaga khusus ini dapat terpenuhi.

Munculnya Kepmenpan No.PER/3/M.PAN/3/2009 tentang jabatan fungsional Arsiparis dan angka kreditnya, jelas makin menghambat upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menambah jumlah arsiparis tingkat terampil. Karena itu pemerintah provinsi perlu membuat kebijakan baru dengan memberi kemudahan bagi PNS yang ingin beralih menjadi fungsional Arsiparis. Kebijakan ini meliputi peningkatan kesejahteraan, kemudahan dalam berkarier serta pembinaan berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan, untuk memberi jaminan pada arsiparis agar dapat berkomitmen dengan baik pada tugas dan tanggungjawab yang diembannya.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga pengelola kearsipan, perlu dilakukan penciptaan tenaga pengelola kearsipan baik melalui penciptaan tenaga fungsional arsiparis maupun bimbingan teknis terhadap pengelola-pengelola kearsipan disetiap instansi/lembaga. Arsiparis/tenaga pengelola kearsipan ini mempunyai peranan penting didalam penciptaan arsip, dimana arsip digunakan sebagai alat pembuktian bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu dijamin keberadaan tenaga pengelola kearsipan ini baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya.

Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan perlu diberdayakan sebaik-baiknya. Mereka perlu didorong agar mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Pemahaman dan penguasaan teknologi informasi mutlak diperlukan, sehingga mereka tidak jauh ketinggalan jaman. Apalagi dengan adanya Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lingkup informasi menjadi lebih beragam.

Pustakawan dan Arsiparis harus memiliki ethos kerja tinggi. Mereka haruslah aplikatif, selektif dan koordinatif dalam menyeleraskan ketentuan yang berlaku dengan peraturan perundangan yang ada. Tuntutan masyarakat akan layanan informasi di tengah era keterbukaan informasi, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dipahami sebagai tanggung jawab. Ini menjadi tantangan, agar ke depan mampu menyediakan informasi bagi publik.

Sebagai pengelola informasi, Pustakawan dan Arsiparis harus mampu meningkatkan produktivitas pengolahan khasanah dan koleksinya, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Karena itu, kemampuan teknis pengolahan, strategi dan prioritas tenaga pengolah perlu senantiasa ditingkatkan.

Kesadaran tentang pentingnya, perpustakaan dan kearsipan perlu dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan baru yang berpihak pada pengembangan perpustakaan dan kearsipan.

Pustakawan, Arsiparis, tenaga teknis pengelola perpustakaan dan tenaga teknis pengelola kearsipan adalah aset penting bagi pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. Mereka harus diberi motivasi dan kepercayaan untuk mengembangkan diri. Dengan begitu, mereka lebih leluasa berkiprah dan berkreasi dalam memenuhi kebutuhan informasi publik. Karena itu sudah sewajarnya pemerintah provinsi memberi apresiasi tersendiri, agar kinerja perpustakaan dan kearsipan dapat berhasil dan berdayaguna dengan baik.

2. Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan

Teknologi informasi telah merambah ke berbagai bidang. Sudah saatnya perpustakaan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) ini untuk pengelolaannya. Sistem otomasi dan digitalisasi bahan pustaka perlu dilakukan. E- Library menjadi begitu penting untuk pengembangan layanan perpustakaan di tengah maraknya era gadget dewasa ini. E-Library

memungkinkan pengunjung perpustakaan bisa mengakses buku pustaka, tanpa harus datang ke perpustakaan.

Pada saat ini, perpustakaan sudah dikelola secara computerized. Pengguna yang datang ke perpustakaan tidak lagi mencari buku secara manual dengan katalog. Data buku koleksi perpustakaan sudah disimpan ke dalam database, sehingga pengguna bisa mengaksesnya melalui komputer yang telah disediakan.

Peraturan perundangan tentang kearsipan, masih terbatas. Hal ini cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan di Provinsi Jawa Timur. Karena itu Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur terus berupaya menghasilkan produk-produk hukum kearsipan yang nanti akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kearsipan di Provinsi Jawa Timur.

Melalui produk hukum kearsipan diharapkan, sistem kearsipan dapat berjalan dengan baik di setiap SKPD. Dengan begitu tertib arsip dan administrasi dapat terwujud. Jika tertib arsip dan tertib administrasi dapat terwujud di setiap SKPD, maka manajemen kearsipan dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. Dan pemerintahan yang baik dan bersih , seperti yang diharapkan dalam reformasi birokrasi dapat terwujud.

Penyelamatan arsip yang bernilai dari lembaga pemerintah maupun swasta juga dapat dilakukan sesuai prosedur. Hal ini sudah tentu memudahkan lembaga kearsipan melakukan penilaian dan pengakusisian terhadap arsip-arsip tersebut.

Di satu sisi, dengan sistem administrasi kearsipan yang baik, setiap SKPD bisa dengan mudah melakukan penyusutan terhadap arsip-arsip yang dimiliki. Arsip yang masih memiliki nilai bagi kelangsungan organisasi bisa disimpan sebagai arsip dinamis. Sedang arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun tetapi bernilaiguna kesejarahan dapat disimpan di lembaga kearsipan, melalui akuisisi Arsip. Arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun baik bagi lembaga pencipta maupun lembaga kearsipan, dapat dimusnahkan. Tentu saja hal ini dilakukan setelah melalui penilaian oleh tim yang telah ditentukan.

Fenomena Pilkada dapat dijadikan sebagai momen bagi lembaga kearsipan untuk mendapatkan arsip bernilai informasi tinggi. Arsip harus sudah dikelola sejak diciptakan. Dengan begitu, akan memudahkan petugas ketika melakukan pendataan hingga penataan arsip di KPUD.

Desa sebagai wilayah administrasi terkecil dalam lembaga kepemerintahan, juga perlu dikembangkan sistem administrasinya. Program Arsip Masuk Desa menjadi upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa. Hal ini dilakukan melalui pembinaan kearsipan terhadap Sekretaris Desa di seluruh Provinsi Jawa Timur.

Jika setiap SKPD dan lembaga-lembaga penghasil arsip dapat menjalankan manajemen arsip secara baik dan benar, tentu upaya penyelamatan arsip yang bernilai guna dapat dicapai.

Dengan berjalannya manajemen kearsipan, sudah tentu memerlukan sarana prasarana yang memadai untuk penyimpanannya. Dan ini sering menjadi kendala bagi lembaga, sehingga banyak arsip ditemukan dalam kondisi yang rapuh bahkan kacau karena tidak memiliki sarana prasarana yang memadai. Jika ini terjadi pada arsip-arsip yang bernilaiguna, tentu akan membahayakan penyelamatan aset penting negara. Karena itu pengelolaan arsip harus diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana serta upaya pelestariannya.

Di sisi lain, hadirnya UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan. Banyak lembaga yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi lembaganya serta menghasilkan arsip elektronik. Di satu sisi, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Sudah tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera mempersiapkan diri dalam pengelolaan arsip elektronik tersebut.

3. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender , melalui kebijakan dan program yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, termasuk di dalamnya pembangunan perpustakaan dan kearsipan.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi berupaya mewujudkan kepeduliaan konkretnya dengan mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan.

Fakta yang ada saat ini, bahwa masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan perpustakaan dan kearsipan. Pembangunan perpustakaan dan kearsipan masih didominasi oleh laki-laki dibanding perempuan. Hal ini tampak terlihat pada beberapa aspek yang tidak seimbang, seperti : data pengunjung, data buku koleksi maupun data sarana prasarana yang ada.

Faktor utama yang sangat mempengaruhi ketidakseimbangan partisipasi perpustakaan dan kearsipan, adalah kondisi sosiokultural masyarakat.

Laki-laki cenderung bebas beraktifitas di luar rumah, sedangkan wanita lebih banyak bekerja di sektor domestik. Ketidakseimbangan ini makin diperparah dengan keberadaan perpustakaan yang kurang memahami kebutuhan perempuan dan tidak berperspektif gender.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan melalui kegiatan yang direncanakan, berupaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Berbagai kegiatan telah dipersiapkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dibanding laki-laki dalam bidang perpustakaan dan kearsipan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan perpustakaan dan kearsipan.

Upaya mencukupi kebutuhan buku koleksi yang berperspektif gender terus dilakukan. Pelayanan perpustakaan yang berorientasi pada kebutuhan perempuan juga diadakan, dengan cara mendatangi kelompok perempuan terutama di wilayah marginal. Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) menjadi sarana untuk memobilisasi perpustakaan hingga ke wilayah terpencil yang sulit dijangkau.

Di lingkup intern, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sedang mempersiapkan terbentuknya women corner dan ruang layanan anak. Tujuannya adalah agar perpustakaan benar-benar mampu memberi ruang publik yang nyaman bagi kebutuhan gender dan anak. Tentu saja ini harus diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang juga berperspektif gender.

4. Intensitas Gemar Membaca

Pemerintah melalui lembaga perpustakaan berupaya meningkatkan minat dan budaya masyarakat. Melalui Pencanangan Minat dan Budaya Baca Se Jawa Timur 2009 oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, upaya ini digantungkan. Hal ini harus dilakukan mengingat, membaca belum menjadi kebutuhan dan kebiasaan hidup di masyarakat. Padahal membaca merupakan satu kunci menuju sebuah peradaban dan kebudayaan yang lebih baik. Dengan membaca, cakrawala berpikir akan terbuka dan meningkatkan ilmu pengetahuan.

Kebiasaan membaca inilah yang harus ditanamkan pada masyarakat sejak dini, sehingga dengan kesadaran membiasakan diri untuk membaca sebagai bagian dari hidupnya.

Untuk lebih menggiatkan dan mendorong masyarakat menjadi gemar membaca, perpustakaan perlu mengintensifkan upaya untuk meningkatkan kegiatan gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan. Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan melalui penyediaan buku-buku berkualitas dan murah serta dengan mengembangkan pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana belajar non formal.

Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan gemar membaca dapat dilakukan melalui penyuluhan secara intens kepada masyarakat. Adapun caranya dengan melakukan kegiatan yang terkait dengan perpustakaan dan perbukuan, program pengembangan TBM, serta inovasi lain dengan menggunakan teknologi informasi.

Upaya mendorong terwujudnya pembudayaan gemar membaca dapat difokuskan pada parameter, antara lain: pemahaman semua pihak terhadap pembudayaan gemar membaca, terjadinya gerakan kebersamaan untuk menangani sumber daya perpustakaan dan minat baca, terjadinya kemitraan sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta, serta terjaganya mekanisme kontrol sosial di mayarakat untuk mengembangkan konsep, tujuan dan sasaran pembudayaan gemar membaca.

Animo masyarakat terhadap layanan perpustakaan, sebenarnya cukup tinggi. Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran yang menyediakan berbagai instrumen praktis bagi kebutuhan membaca masyarakat. Sayangnya, hal ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Sementara kebutuhan masyarakat akan informasi yang bersifat mendidik makin tidak terbendung lagi. Hal ini menjadi satu tantangan tersendiri bahwa perpustakaan harus mampu menjadi penyedia kebutuhan baca masyarakat, di manapun tempatnya.

Bagi masyarakat terpelajar yang tinggal di wilayah perkotaan, tentu kebutuhan informasi mudah terpenuhi apapun caranya. Tetapi bagi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan, baik secara sosial ekonomi maupun akses, tentu ini menjadi hambatan yang cukup signifikan. Ini menjadi ironi dalam mengakses layanan informasi perpustakaan. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadi ketimpangan partisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial politik.

Dalam kerangka pelayanan publik, perpustakaan harus memberikan layanan yang menyeluruh hingga menjangkau masyarakat marginal. Ini perlu untuk menggugah semangat membangun bagi diri dan lingkungannya. Di samping itu, perpustakaan perlu dilengkapi dengan buku-buku koleksi yang sesuai untuk kebutuhan masyarakat yang dilayani. Hal ini perlu, agar potensi masyarakat di wilayah marginal dapat dikembangkan. Dengan begitu kesejahteraan sosial dan ekonominya dapat diperbaiki.

Untuk menjangkau layanan perpustakaan hingga ke wilayah marginal, perlu sarana prasarana yang cukup. Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) diharapkan mampu memobilisasi massa yang didatangi. Dengan buku pustaka yang mencukupi kebutuhan berbagai segmen masyarakat setempat, diharapkan upaya membangun minat dan budaya baca dapat terwujud.

Layanan perpustakaan perlu dikembangkan hingga ke desa dan sekolah. Melalui program Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS) dan Layanan Terpadu Perpustakaan Desa (LTPD), lembaga perpustakaan berupaya menjangkau pelayanannya sampai ke desa dan sekolah. Adapun jangkauan yang ingin dicapai adalah seluruh desa dan sekolah, bekerjasama dengan Perpustakan Umum di Kabupaten Kota se Jawa Timur.

Untuk lebih menggiatkan budaya dan minat baca ini, perlu sosialisasi secara kontinyu dengan sasaran siswa sekolah, organisasi wanita maupun masyarakat luas. Upaya lain adalah penyebaran brosur / leaflet serta lomba–lomba yang diikuti oleh siswa sekolah.

5. Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Kearsipan

Pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Layanan baca dan pinjam disediakan untuk pengunjung yang datang dengan berbagai kebutuhan buku di perpustakaan. Hal ini mendorong lembaga perpustakaan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas buku koleksi pustaka.

Pada saat ini, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memiliki koleksi umum sejumlah 101.651 judul (401.732 eksemplar). Koleksi Deposit yang merupakan hasil dari Undang-undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam (KCKR) sebanyak 17.061 eksemplar dan 451 keping. Sayangnya, jumlah tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan pengunjung. Apalagi dengan makin banyaknya buku baru yang dihasilkan oleh penerbit.

Dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, lembaga perpustakaan dituntut memenuhi kebutuhan buku-buku berkualitas bagi masyarakat. Karena itu upaya pengembangan koleksi penting dilakukan.

Khasanah arsip statis yang dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan berasal dari masa kolonial yang berbahasa Belanda, masa Jepang yang berbahasa Jepang, masa Republik, masa Orde Baru dan Reformasi yang berbahasa Indonesia. Arsip-arsip tersebut terdiri dari arsip konvensional yang berupa arsip tekstual, gambar arsitektur dan kartografi. Arsip Media Baru terdiri dari foto, film, video, VCD/DVD, Microfilm, kaset/rekaman suara dan Arsip Elektronik. Jumlah ini akan terus bertambah seiring berjalannya roda organisasi. Jika manajemen kearsipan diterapkan di setiap organisasi, ini artinya penambahan arsip akan terus berlangsung karena lembaga kearsipan akan dengan sendirinya menerima arsip dari lembaga-lembaga melalui akuisisi.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jatim menerima penyerahan arsip dari lembaga lain. Alih media dan reproduksi arsip yang tidak dimiliki juga merupakan upaya penambahan khasanah. Tercatat hingga saat ini ada sejumlah 572,2 ML (37.836 berkas) arsip tekstual, 222.012 lembar arsip foto (negatif dan positif), 5.624 kaset video, 23 roll arsip film 16 mm, 32 reel mikrofilm, 1.345 kaset rekaman suara dan wawancara sejarah lisan, 561 keping VCD/DVD dan 755 lembar dan 182 bendel peta kartografi dan gambar kearsitekturan.

6. Penyelamatan Sumber-sumber Primer dan Sekunder Pasca Bencana

Dari semua aset negara yang ada, arsip (sumber primer) adalah aset yang paling berharga, karena dari situlah suatu bangsa dapat dilihat eksistensinya. Provinsi Jawa Timur sebagai daerah yang rawan terhadap bencana, baik karena ulah manusia maupun alam harus mempersiapkan diri menghadapi bahaya ini. Bagi lembaga perpustakaan dan kearsipan, dampak nyata dari bencana ini adalah rusak / hilangnya sejumlah informasi penting. Apalagi sebagian besar khasanah dan koleksi yang dimiliki dalam media kertas yang mudah rapuh. Oleh karena itu, upaya antisipasi harus lebih didahulukan dengan memfokuskan diri pada penyelamatan arsip sebelum terjadi bencana.

Untuk penyelamatan arsip sebelum terjadinya bencana, dilakukan melalui beberapa kegiatan :

a. Akuisisi arsip dari lembaga pemerintah, swasta, Ormas/Orsospol dan perorangan

b. Menyelamatkan informasi arsip melalui alih media

c. Penyelamatan fisik arsip melalui preservasi arsip

Sejumlah kasus, seperti banjir di Bojonegoro, Trenggalek menjadi bukti. Banyak arsip dan buku-buku koleksi terendam banjir. Kerugian material immaterial tidak ternilai harus ditanggung jika bencana datang.

Untuk mengantisipasi adanya bencana lebih lanjut, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.Nomor 29 tahun 2004 tentang Penyelamatan Arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bencana yang datang beruntun di berbagai wilayah di Indonesia, akhirnya juga membuat pemerintah melalui Menpan mengeluarkan kebijakan, seperti tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 07/M.PAN/2005 tentang Program Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara terhadap Musibah/Bencana.

Fenomena bencana yang banyak terjadi saat ini, menjadi moment penting bagi Badan Perpustakaan dan Kearsipan untuk menyelamatkan arsip-arsip yang dimiliki dengan mendayagunakan depo penyimpanan arsip in aktif (Records Center). Sasaran pemanfaatan Records Center yang dibangun di Pandaan adalah oleh lembaga pemerintah, swasta maupun organisasi massa yang ingin menyimpan dokumennya secara aman dan terpercaya.

Untuk itu sejumlah fasilitas pendukung perlu ditambahkan agar Records Center ini dapat lebih bermanfaat di masa mendatang serta sosialisasi keberadaan Depo Pandaan pada masyarakat luas.

Bab -2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. JATIM

A. Realisasi Pelaksanaan APBD Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2013 mendapat alokasi anggaran Rp. 51.350.000.000,-

Anggaran tersebut di atas sampai dengan akhir Desember 2013 telah direalisasikan sebesar Rp. 50.055.297.262,- atau sebesar 97,48 %, dengan rincian program sebagai berikut :

1. *Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan*

   Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.977.500.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

   a) Penyusunan Program Kerja
   b) Menyusun / Menyempurnakan Peraturan/Pedoman Standar Pelaksanaan Kearsipan
   c) Pembinaan / Orientasi Tata Kearsipan
   d) Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis
   e) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Kearsipan
   f) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Bintek Pengamanan dan Penyelamatan Arsip Pemilu

Anggaran program sebesar Rp. 3.977.500.000,- dapat direalisasikan sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 3.973.533.570,- atau 99,90 %.

2. *Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah*

   Program penyelamatan dan pelestarian Dokumen / Arsip Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.353.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

   a) Penduplikatan dokumen / arsip daerah dalam bentuk informatika
   b) Akuisisi arsip statis / permanen dari Badan Pemerintah, Swasta dan Perorangan
   c) Pemeliharaan dan pengamanan arsip statis
   d) Penyusutan arsip inaktif
   e) Pengolahan arsip inaktif
   f) Pengamanan Arsip Pemilu

   Anggaran program sebesar Rp5.353.000.000,- dapat direalisasikan sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar Rp. 5.331.838.282,- atau 99,60 %.

3. *Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi*

   Program peningkatan kualitas pelayanan informasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.571.402.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

   a) Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
   b) Penyediaan sarana layanan informasi arsip
   c) Sosialisasi kearsipan
   d) Pelayanan informasi kearsipan

Anggaran program sebesar Rp. 1.571.402.000,- dapat direalisasikan sampai Desember 2013 sebesar Rp. 1.548.623.215,- atau 98,55 %.

4. *Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan*

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 29.148.098.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a) Pengembangan minat dan budaya baca
b) Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
c) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
d) Penyediaan bahan pustaka untuk perpustakaan umum daerah
e) Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
f) Pembinaan perpustakaan di Jawa Timur
g) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyuluhan dan pengembangan budaya baca
h) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pengelolaan perpustakaan
i) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka sosialisasi dan bimbingan minat baca dan kebiasaan baca masyarakat
j) Konservasi koleksi dan deposit

Anggaran program sebesar Rp. . 29.148.098.000,- dapat direalisasikan sampai Desember 2012 sebesar Rp. 28.087.538.597,- atau 96,36 %.

B. Pencapaian Kinerja Pembangunan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

Analisis pencapaian kinerja pembangunan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur disajikan menurut program sebagai berikut :

1. *Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipa*n

   Pencapaian kinerja program perbaikan sistem administrasi kearsipan adalah sebagai berikut :

   a) Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebanyak 8 Dokumen.

   b) Rapat koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan 3 (tiga) kali setahun.

   c) Rapat Koordinasi Perumusan Draft Peraturan Daerah tentang Perpustakaan dan Kearsipan 2 (dua) kali dengan 80 orang peserta

   d) Bintek Kearsipan bagi Sekretaris Desa dan TOT bagi pembina kearsipan desa sebanyak 469 orang

   e) Pengamanan dan penyelamatan arsip pemilu sebanyak 10.000 berkas

   f) Penilaian angka kredit arsiparis sebanyak 75 orang

   g) Temu Karya Fungsional Pustakawan dan Arsiparis sebanyak 1 kali

   h) Peraturan / pedoman standar pelaksanaan kearsipan sebanyak 2 (dua) peraturan

   i) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program / kegiatan selama 12 bulan

j) Laporan Evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, Laporan Tahunan dan LAKIP 2013

2. *Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen (Arsip Daerah)*

Pencapaian kinerja program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah adalah sebagai berikut :

a) Penduplikatan dokumen / arsip daerah dalam bentuk informatika sebanyak 500 berkas
b) Akuisisi arsip instansi pemerintah, instansi swasta, BUMN, Ormas, perorangan sebanyak 4.500 berkas
c) Fumigasi depo arsip statis Jagir seluas 800 m3 sebanyak 4 (empat) kali.
d) Pengolahan arsip inaktif sebanyak 9.000 berkas
e) Penyusutan arsip sebanyak 9.000 berkas
f) Pengamanan arsip pemilu sebanyak 10.000 berkas

3. *Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi*

Pencapaian kinerja kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut:

a) Terbitnya Naskah Sumber Arsip serie XIV 1 judul 200 buku
b) Terbitnya Buletin Suara Badar edisi XX 200 buku
c) Lomba Arsiparis Teladan se Jawa Timur
d) Lomba Lembaga Kearsipan Teladan Kab/Kota se Jawa Timur
e) Sosialiasi kearsipan dengan peserta 630 orang
f) Workshop kearsipan dengan peserta 80 orang

4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pencapaian kinerja pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan adalah sebagai berikut :

- Pemetaan perpustakaan sekolah sebanyak 150 unit Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan 400 buku NPP
- Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS) sebanyak 25 sekolah dan Layanan Terpadu Perpustakaan Desa (LTPD) sebanyak 20 desa, Lembaga Pemasyarakatan (LP) 10 lokasi dengan jumlah pemustaka 1.008.641 orang
- Pameran perpustakaan dan kearsipan sebanyak 5 kali
- Penerbitan Majalah PUSAR sebanyak 4 kali 500 buku
- Sosialisasi dan penyuluhan minat baca dalam rangka promosi perpustakaan melalui dialog khusus TVRI sebanyak 2 (dua) kali, melalui radio (siaran interaktif) sebanyak 2 (dua) kali, Siaran Berita Jawa Timur sebanyak 2 (dua) kali, publikasi media massa Bhirawa sebanyak 6 kali, Gebyar Minat Baca sebanyak 1000 orang, Mobil Dongeng Keliling 48 kali (1.920 anak).
- Pembuatan banner, poster dan brosur
- Pengadaan bahan pustaka sebanyak 6.728 buku
- Bimtek pengelola perpustakaan diikuti oleh 525 orang
- Rapat teknis pengolahan bahan pustaka diikuti 100 orang
- Penyediaan sarana prasarana perpustakaan
- Sosialisasi minat dan kebiasaan baca diikuti oleh 400 peserta
- Penyuluhan pengembangan budaya baca sebanyak 500 orang

- Kegiatan survey IKM dengan hasil 78,11 %
- Lomba story telling tingkat SD
- Lomba Perpustakaan Desa
- Otomasi perpustakaan
- Bantuan buku untuk 10 perpustakaan desa di Jawa Timur , sebanyak 2.600 Eksemplar.
- Pengembangan e-library
- Renovasi interior ruang layanan perpustakaan

Bab -3 VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN RENCANA PROGRAM

A. VISI dan MISI

1. VISI

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menetapkan visi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu :

"Jawa Timur Gemar Membaca, Cerdas, Mandiri, Sejahtera dan Tertib Kearsipan"

2. MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2015, maka misi pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

a. Mewujudkan masyarakat Jawa Timur gemar membaca, cerdas, mandiri, dan sejahtera. Misi ini untuk mewujudkan gemar membaca sebagai budaya masyarakat Jawa Timur, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan serta kapasitas kelembagaan secara terpadu sebagai wujud dari pemerataan dan perluasan akses pendidikan non formal.

b. Mewujudkan tertib arsip kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Misi ini untuk mewujudkan tertib arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean government) melalui pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapid an handal yang didukung dengan sistem kearsipan yang komprehensif.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yaitu:

a. Meningkatkan sumber daya perpustakaan di Jawa Timur
b. Meningkatkan pengembangan, pendayagunaan dan pelestarian bahan perpustakaan
c. Meningkatkan budaya baca masyarakat di Jawa Timur
d. Meningkatkan SDM pengelola kearsipan dan sistem administrasi kearsipan yang berkualitas di Jawa Timur
e. Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan arsip yang bernilaiguna.

2. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang (sampai dengan akhir tahun 2015), terkait dengan perumusan tujuan di atas, diindikasikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya perpustakaan di Jawa Timur, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kuantitas sarana prasarana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu
2. Meningkatkan pengembangan, pendayagunaan dan pelestarian bahan pustaka tercetak, dengan sasaran terukur meliputi:
   - Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan
   - Meningkatnya jumlah koleksi deposit
   - Meningkatnya jumlah koleksi muatan lokal Jawa Timur
   - Meningkatnya jumlah koleksi e-book
3. Meningkatkan budaya baca masyarakat di Jawa Timur, dengan sasaran terukur meliputi :
   - Jumlah pemustaka
   - Jumlah buku yang dibaca di tempat
   - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
   - Indeks Minat dan Budaya Baca
4. Meningkatkan SDM pengelola kearsipan dan sistem administrasi kearsipan yang berkualitas di Jawa Timur, dengan sasaran terukur meliputi :
   - Jumlah pedoman kearsipan yang disusun
   - Kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan
   - Prosentase SKPD yang menyelenggarakan sistem kearsipan

5. Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan arsip yang bernilai guna, dengan sasaran terukur meliputi :
   - Jumlah arsip yang menjadi bahan informasi
   - Meningkatnya jumlah pengguna arsip

C. ARAH KEBIJAKAN

Beberapa arah kebijakan berikut ini akan menjadi acuan dan pertimbangan dalam upaya melaksanakan misi, tujuan dan sasaran di lingkup tugas Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur adalah :

a. Membangun sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi, meliputi :
   - Menyusun peraturan / pedoman sistem kearsipan
   - Mengembangkan ke arah sistem administrasi kearsipan digital
   - Optimalisasi pelatihan - pelatihan SDM kearsipan baik pejabat fungsional arsiparis maupun pengelola arsip

b. Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip bernilai guna meliputi :
   - Akuisisi arsip statis baik di instansi Pemerintah, BUMN/D, Orsospol / Ormas, Swasta maupun Perorangan
   - Meningkatkan preservasi dan alih media arsip statis
   - Mengelola dan merawat arsip statis maupun inaktif

c. Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi, seperti :

- Pameran arsip
- Promosi jasa kearsipan
- Penerbitan naskah sumber dan bulletin kearsipan
- Pelayanan informasi arsip

d. Menyelenggarakan tugas pelayanan dengan melakukan optimalisasi SDM dan pelayanan publik;

e. Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan serta memfasilitasi pengembangan koleksi semua jenis perpustakaan.

D. RENCANA PROGRAM

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada berusaha memenuhi visi dan misi melalui program kerja yang berdasarkan pada Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur dan Rencana Strategik (Renstra) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Program dan kegiatan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sebagai berikut :

1. **Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan**

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan bertujuan mengembangkan sistem administrasi yang efektif dan efisien dengan dukungan regulasi daerah serta SDM kearsipan yang profesional. Program ini diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas standar operasional prosedur penyelenggaraan kearsipan dinamis dan statis, peningkatan kuantitas dan perbaikan kualitas dan kesejahteraan arsiparis dan sumber daya manusia bidang kearsipan di setiap SKPD Pemerintah Provinsi, perbaikan manajemen kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pengawasan, supervisi kearsipan. Kegiatan yang mendukung Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan adalah sebagai berikut :

- Menyusun / Menyempurnakan Peraturan / Pedoman Standar Pelaksanaan Kearsipan
- Pembinaan / Orientasi Tata Kearsipan
- Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis
- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Kearsipan
- Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Bimbingan Teknis Pengamanan dan Penyelamatan Arsip Pemilu
- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kearsipan

Dengan indikator program :

- Jumlah Pengelola SDM Kearsipan
- Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku

2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

Program penyelamatan arsip dan pelestarian dokumen /arsip daerah bertujuan untuk penyelamatan arsip baik fisik maupun informasi, yang berasal dari SKPD Pemprov Jatim, BUMN/BUMD, Swasta, Ormas/Orsospol, dan Perorangan, sehingga arsip dapat didayagunakan untuk kepentingan generasi mendatang.

Program ini diarahkan pada pengumpulan atau akuisisi arsip, pengolahan, pemeliharaan, perawatan, pelestaraian arsip-arsip yang bernilaiguna tinggi pada SKPD Pemerintah Provinsi, BUMD Pemerintah Provinsi, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, swasta maupun perorangan sedini mungkin yang kelak berguna bagi kepentingan sejarah maupun generasi mendatang untuk menghindari kehilangan dan kerusakan arsip-arsip atau informasi yang terekam di dalamnya. Kegiatan yang mendukung Program Penyelamatan Arsip dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah adalah sebagai berikut :

1) Penduplikatan Dokumen / Arsip Daerah dalam bentuk Informatika
2) Akuisisi Arsip Statis / Permanen dari Instansi Pemerintah, Swasta dan Perorangan
3) Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip Statis
4) Penyusutan Arsip Inaktif
5) Pengolahan Arsip Inaktif
6) Pengamanan Arsip Pemilu

Dengan indikator program :

- Jumlah Arsip yang menjadi bahan informasi

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan bertujuan meningkatkan mutu pelayanan dan arus informasi kearsipan dari dan untuk masyarakat. Program ini diarahkan pada pelayanan dua arah, yaitu pelayanan dan pemasyarakatan kepada SKPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai unit jaringan dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan pelayanan serta pemasyarakatan kepada organisasi sosial politik, pesantren, sekolah-sekolah/perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pers, publik, baik dalam bentuk apresiasi, pemberian penghargaan, pemberian layanan jasa kearsipan maupun layanan informasi arsip. Kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip
2. Sosilisasi Kearsipan
3. Pelayanan Informasi Kearsipan

Dengan indikator program :

- Peningkatan pengguna layanan informasi dan jasa kearsipan
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan

4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan bertujuan untuk mengembangkan budaya baca, Sastra Indonesia dan Sastra Daerah di Provinsi Jawa Timur.

Adapun segmen yang dituju adalah peserta didik dan masyarakat luas, terutama masyarakat yang tinggal di lingkungan marginal. Hal ini dilakukan untuk membangun masyarakat marginal, agar menjadi masyarakat yang berpengetahuan, berbudaya dan mandiri. Program ini diarahkan pada pengembangan, publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, penyediaan bahan pustaka, pembinaan SDM dan perpustakaan di Jawa Timur. Kegiatan yang mendukung Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

1) Pengembangan Minat dan Budaya Baca
2) Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah
3) Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
5) Penyedian Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
6) Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur
7) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Penyuluhan dan Pengembangan Budaya Baca

8) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengelolaan Perpustakaan
9) Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Sosialisasi dan Bimbingan Minat Baca dan Kebiasaan Baca Masyarakat
10) Konservasi Koleksi dan Deposit

Dengan indikator program :

- Peningkatan Indeks Minat Baca masyarakat Jawa Timur
- Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan
- Perbandingan Jumlah Judul dengan Jumlah Koleksi
- Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan

Bab -4 INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

A. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja suatu organisasi dalam suatu kurun waktu tertentu. Untuk itu, indikator kinerja harus di rencanakan sesuai dengan kondisi faktual organisasi sehingga memungkinkan organisasi mencapainya. Untuk mengukur kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2015, maka indikator kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan direncanakan sebagai berikut :

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Program Perbaikan Administrasi Perkantoran	- Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	120 orang
		- Jumlah SKPD Yang Menerapkan Arsip Secara Baku	10 SKPD
		- Jumlah Draft peraturan kearsipan dan laporan hasil kajian	4 buku
		- Jumlah Penilaian Angka Kredit	35 orang
		- Jumlah Pengelola Kearsipan Terlatih	300 orang
		- Jumlah SDM Pengelola Arsip Pemilu	100 orang

1	2	3	4
2.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	- Jumlah Arsip Yang Menjadi Bahan Informasi - Jumlah Arsip Statis Yang Dialihmediakan - Jumlah Arsip Yang Diakuisisi - Jumlah Arsip Yang Diolah - Jumlah Arsip Statis Yang Dipelihara - Jumlah Arsip Inaktif Yang Diolah - Jumlah Arsip Pemilu Yang Diakuisisi	6 daftar Inventaris 2.500 berkas 3000 berkas 6 daftar Inventaris 260 ML 30.000 berkas 1000 berkas
3.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	- Jumlah Pengguna Informasi Kearsipan - Jumlah IKM Layanan Jasa Kearsipan - Jumlah Naskah Sumber Arsip - Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi	3100 Orang 77,85 2 Buku 500 orang

1	2	3	4
4.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	- Jumlah Indeks Minat dan Budaya Baca - Jumlah IKM Layanan Perpustakaan - Jumlah Pengunjung Perpustakaan - Jumlah Buku Bantuan Pengembangan Perpustakaan di daerah - Jumlah Pameran Perpustakaan Yang diikuti - Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan - Jumlah Nomor Pokok Perpustakaan - Jumlah Koleksi dibaca ditempat - Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan - Jumlah Anggota Perpustakaan - Jumlah Koleksi yang dikonservasi	58 78,35 1.375.000 Pemustaka 2000 Judul 5 kali 20 Perpustakaan Desa 200 NPP 2.200.000 Pemustaka 500 Orang 20.000 Pemustaka 10.000 Judul

1	2	3	4
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana	
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM	
7.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	- Jumlah Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana	
8.	Program Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan	- Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM	

B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan untuk kurun waktu tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat, Pemustaka, Pengguna Arsip
b. Instansi Pemerintah, BUMN, Swasta, Perguruan Tinggi, SMU/SMK;
c. Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Sosial Politik ;
d. SDM Kearsipan / Arsiparis;
e. SDM Pengelola Perpustakaan / Pustakawan ;
f. Arsip Tekstual dan Arsip Media Baru ;
g. Semua jenis Perpustakaan ;
h. Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota ;
i. Kelurahan dan Desa

Bab - 5 RENCANA ANGGARAN INDIKATIF

Keberhasilan suatu program perlu didukung dengan anggaran yang memadai, oleh sebab itu direncanakan pendanaan indikatif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Perbaikan Administrasi Perkantoran	a. Menyusun/Menyempurnakan peraturan pedoman standart pelaksanaan kearsipan	Rp.250.000.000	
		b. Pembinaan Orientasi Tata Kearsipan	Rp.250.000.000	
		c. Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis	Rp.200.000.000	
		d. Pendidikan Masyarakat Produkktif dalam rangka kearsipan	Rp.900.000.000	
		e. Pendidikan Masyarakat Produktif dalam rangka Bintek dan Pengamanan Arsip Pemilu	Rp.250.000.000	
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	a. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Rp.350.000.000	
		b. Akuisisi Arsip Statis dari Badan Swasta dan Perorangan	Rp.750.000.000	
		c. Pemeliharaan dan pengamanan arsip statis	Rp.400.000.000	

		d. Penyusutan Arsip Inaktif	Rp.400.000.000	
		e. Pengolahan Arsip Inaktif	Rp.300.000.000	
		f. Pengamanan Arsip Pemilu	Rp.300.000.000	
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	a. Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Rp.400.000.000	
		b. Sosialisasi Kearsipan	Rp.500.000.000	
		c. Pelayanan Informasi Kearsipan	Rp.500.000.000	
4.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	a. Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Rp.600.000.000	
		b. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah	Rp.400.000.000	
		c. Publikasi dan Sosialisasi minat dan budaya baca	Rp.600.000.000	
		d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Rp.1.700.000.000	
		e. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Rp.1.500.000.000	
		f. Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur	Rp.600.000.000	
		g. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka penyuluhan dan pengembangan Budaya Baca	Rp.800.000.000	
		h. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka pengelolaan perpustakaan	Rp.600.000.000	

		i. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka sosialisasi dan bimbingan minat baca dan kebiasaan baca masyarakat	Rp.600.000.000	
		j. Konservasi Koleksi Deposit	Rp.600.000.000	
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.7.871.000.000	
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Rp.2.125.000.000	
7.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	a. Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Rp.1.304.000.000	
8.	Program Penyusunan, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah	a. Program Penyusunan, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah	Rp.339.000.000	

Rencana pendanaan indikatif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2015 tersebut di atas dirinci sesuai sumber pendanaannya sebagai berikut :

1. APBD Prov. Jatim sebesar Rp. 31.139.000.000,-
2. APBN sebesar Rp. 500.000.000,-

Bab - 6 PENUTUP

Rencana kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur ini merupakan rencana kerja jangka pendek yaitu rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2015

Demikian rencana kerja ini disusun. Diharapkan agar rencana kerja ini dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 2014

KEPALA BADAN
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Drs. A. MUDJIB AFAN, MARS.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581009 198002 1 001